

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Hasil pembahasan dari rumusan masalah tentang bagaimana bentuk eufemisme yang terdapat pada kolom komentar akun @Prabowo subianto? Dapat disimpulkan bahwa bentuk eufemisme yang paling dominan dalam kolom komentar warganet pada akun @Prabowo Subianto di aplikasi X adalah eufemisme dalam bentuk singkatan. Singkatan digunakan sebagai cara pemendekan kata atau frasa yang dianggap terlalu panjang, dengan tujuan mempermudah penyampaian dan memberi kesan lebih halus. Contohnya adalah “BPK” (Badan Pemeriksa Keuangan) dan “KPK” (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang merupakan singkatan resmi menurut kaidah penulisan nasional. Selain singkatan, jenis eufemisme lain yang ditemukan meliputi kata serapan seperti “investigasi” dari bahasa Inggris *investigation*, penggunaan istilah asing seperti “*keep rocking Sir*” “*rocking*” yang berarti goyang, dan metafora seperti “matahari kembar” yang bermakna dua sosok pemimpin dominan. Secara umum, eufemisme digunakan oleh warganet untuk menyampaikan kritik secara halus dan sopan demi menghindari konflik, serta muncul pula dalam bentuk dukungan dengan pilihan kata yang santun, meskipun frekuensinya lebih sedikit.
2. Hasil pembahasan dari rumusan masalah tentang bagaimana bentuk disfemisme yang terdapat pada kolom komentar akun @Prabowo subianto? Dapat disimpulkan bahwa disfemisme lebih dominan dalam komentar warganet di akun @Prabowo Subianto, terutama dalam bentuk kata, karena kata merupakan satuan bahasa yang memiliki satu pengertian. Contohnya adalah kata “bacot” yang berarti mulut, namun digunakan secara kasar untuk menyebut orang yang banyak bicara. Selain kata, disfemisme juga muncul dalam bentuk frasa, seperti “menjilat kekuasaan” yang berarti mencari muka demi keuntungan pribadi, serta dalam bentuk idiom, seperti “balas budi” yang digunakan secara sarkastik. Penggunaan disfemisme

dalam komentar ini mencerminkan ekspresi kekesalan dan ketidakpuasan warganet terhadap kebijakan politik Prabowo. Gaya bahasa yang kasar, merendahkan, dan sarkastik banyak digunakan sebagai bentuk kritik, yang menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan emosi negatif dan ketidakpercayaan terhadap tokoh publik secara langsung.

5.2 Saran

1. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal untuk studi lanjutan yang lebih luas, seperti membandingkan pola bahasa pada berbagai tokoh politik atau platform media sosial yang berbeda. Pendekatan multidisiplin yang menggabungkan linguistik, komunikasi politik, dan sosiologi dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang fenomena bahasa dalam ruang digital. Selain itu, dunia pendidikan juga disarankan untuk memasukkan materi terkait eufemisme dan disfemisme ke dalam kurikulum bahasa dan komunikasi, guna menanamkan kesadaran berbahasa yang kritis dan etis sejak dini. Terakhir, bagi pengelola platform seperti Aplikasi X, penguatan sistem moderasi komentar otomatis, fitur pelaporan, serta deteksi ujaran kebencian sangat penting untuk menjaga etika komunikasi daring. Seluruh pihak memiliki peran dalam menciptakan ekosistem digital yang beradab, sehat, dan mendukung kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

2. Pembaca dan Masyarakat Umum

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pembaca dan umum lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa di ruang publik digital. Penggunaan kata-kata disfemistik yang bersifat kasar, merendahkan, atau menyerang pribadi sebaiknya dikurangi, mengingat dampaknya dapat memperkeruh suasana diskusi dan menimbulkan konflik. Sebagai alternatif, penggunaan eufemisme dapat menjadi cara yang lebih sopan dan santun dalam menyampaikan kritik atau pendapat. Bagi tokoh publik dan pengelola akun resmi, penting untuk memahami bahwa komentar warganet mencerminkan persepsi dan reaksi masyarakat terhadap isu politik tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan

komunikasi digital yang baik, termasuk klarifikasi terhadap isu sensitif dan moderasi komentar yang bijaksana, dapat membantu menciptakan ruang interaksi yang sehat antara pemimpin dan masyarakat. Pemerintah melalui lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika juga diharapkan meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya dalam hal etika komunikasi daring, melalui kampanye publik atau pelatihan yang terarah.